

Sejarah Kekuasaan di Magelang: Era Klasik hingga Kolonial

Heri Priyatmoko^{a,*}, S.R.L. Aji Sampurno^b, Fransisca Tjandrasih Adji^c

a & b. Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

c. Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

*heripriyatmoko@usd.ac.id

Abstract

Magelang was already old, long before the Dutch held the reins. Recorded in a number of inscriptions, Magelang had been favored by Mataram Kuno rulers due to the consideration of its prolific nature and location, in the center of Java. The local term “pakuning tengah pulo Jawa” (nail in the center of Java) is a cultural fact that confirms the geographical position of Magelang. Authority turnover did not make Magelang overturned by rulers. Mataram Islam assigned Magelang as their granary because of its good vegetation due to being surrounded by Mount Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andong, Ungaran, Telomoyo, and Menoreh. As a negaragung (core area) of Mataram Islam, Magelang had become agricultural product supplier. In 1817, Dutch East Indies government established Kedu as a separate residency. A year later, Magelang was made as the capital of Kedu Residency. In 1906, Magelang was appointed as an autonomous city. In 1926, Magelang gained status of stadsgemeente (town municipality) and had the right to regulate its own domestic. History of authority shows territorial changes in Magelang which adjusts the rulers' interests from time to time.

Keyword: Magelang; Negaragung; Vegetation; Staasgemeent

Abstrak

Magelang memang sudah tua, jauh sebelum Belanda memegang kendali. Tercatat dalam sejumlah prasasti, Magelang telah disukai oleh penguasa Mataram Kuno karena pertimbangan alam dan lokasinya yang subur, di tengah Jawa. Istilah lokal “pakuning tengah pulo Jawa” (paku di tengah Jawa) adalah fakta budaya yang menegaskan posisi geografis Magelang. Pergantian kekuasaan tidak membuat Magelang digulingkan oleh penguasa. Mataram Islam menetapkan Magelang sebagai lumbung padi karena vegetasinya yang baik karena dikelilingi oleh Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andong, Ungaran, Telomoyo, dan Menoreh. Sebagai negaragung (wilayah inti) Mataram Islam, Magelang telah menjadi pemasok produk pertanian. Pada tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Kedu sebagai karesidenan tersendiri. Setahun kemudian, Magelang dijadikan sebagai ibu kota Karesidenan Kedu. Pada tahun 1906, Magelang ditetapkan sebagai kota otonom. Pada tahun 1926, Magelang memperoleh status stadsgemeente (kotamadya kota) dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Sejarah kekuasaan menunjukkan perubahan wilayah di Magelang yang menyesuaikan kepentingan penguasa dari waktu ke waktu.

Kata kunci: Magelang; Negaragung; vegetasi; Staasgement

1. Pendahuluan

Selain kondang dengan Candi Borobudur, Pemerintah Magelang belakangan menyebut dirinya sebagai “Kota Seribu Bunga”. Memang banyak aneka jenis tumbuhan yang hidup di kawasan ini. Bahkan, jejak toponim kampung juga masih mempertahankan nama tumbuhan, misalnya Ringinanom, Dumpoh, Kebunpolo, Jambesari, Jambon, dan lainnya. Unsur flora yang dijadikan rujukan untuk identitas wilayah tersebut dapat tumbuh hingga melekat dalam

memori kolektif lantaran faktor topografis-geografis Magelang.

Dicermati dari segi geografis, Magelang merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 400 m dpal (\pm 1.300 kaki), sehingga suhunya relatif sejuk. Suhu pagi hari pukul 06.00 WIB sekitar 20,5° C, dan malam hari pukul 18.00 WIB sekitar 24,7° C. Menurut warta era kolonial *Magelang Middelpunt van den Tuin van Java* (1936), kelembaban udara Magelang di tingkat sedang, sehingga sangat tepat untuk hunian. Di tengah Kota Magelang, bercokol

Gunung Tidar yang melegenda. Menurut ingatan kolektif warga, gunung itu disebut titik tengahnya Pulau Jawa. Buktinya, hidup istilah lokal “*pakuning tengah pulo Jawa*” (pakunya tengah Pulau Jawa).

Kondisi geografis Magelang digambarkan dalam lambang kota. Contohnya, pertemuan Magelang dengan Semarang, Yogyakarta, dan Purworejo disimbolkan dengan penyangga perak. Nyata bahwa Magelang adalah titik persimpangan dari Semarang, Yogyakarta, dan Purworejo. Jarak antara Magelang ke Semarang sekitar 75 km, serta Magelang ke Yogyakarta sekitar 42 km. Dalam kacamata transportasi, Magelang juga mudah dilalui kendaraan lintas kota seperti kereta api yang menghubungkan Semarang dan Yogyakarta.

2. Kajian Literatur

Aneka gunung mengepung Magelang disimbolkan dengan cincin emas mengitari paku (H.J. Sjouke, 1935). Benar adanya, beberapa pegunungan mengitari daerah Magelang, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, Andhong, Ungaran, Telomoyo, dan Menoreh. Kondisi alam tersebut menyebabkan Magelang cocok untuk pertanian maupun perkebunan dan memiliki komposisi tanah subur dari tanah vulkanik. Arsip kolonial mencatat, luas *regentschap* Magelang sekitar 1151,81 km². Dalam *Volkstelling* (1930) dikabarkan bahwa wilayah *district* Magelang kurang lebih 91,29 km². Kemudian, daerah *stadsgemeente* Magelang sekitar 18,12 km² (Purnawan Basundoro, 2012).

Kabupaten Magelang mempunyai luas wilayah yang terbesar daripada kabupaten lain, termasuk wilayah sawah dan pemukiman. Padatnya wilayah Magelang menunjukkan bahwa pada masa lalu, kota itu sudah padat penduduk. Luas area persawahan menunjukkan bahwa daerah itu sangat cocok sebagai wilayah pertanian. Hal itu juga dibuktikan bahwa di wilayah Magelang era Mataram, sudah menjadi lumbung padi bagi kerajaan. Muncul pertanyaan menggelitik, bagaimana potret sejarah kekuasaan berikut kewilayahan di Magelang periode Mataram kuno hingga kolonial? Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut..

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam historiografi Magelang, bukti Prasasti Mantyasih bertarik 907 M selalu hadir sebagai sumber rujukan untuk menyebut kata Metesih dan Magelang. Kenyataan ini menunjukkan daerah Magelang sesungguhnya telah mengada pada periode Mataram Kuno. Artinya, jejak historis Magelang juga bagian

dari produk Mataram Kuno, bukan dimulai era kolonial dan kemerdekaan semata. Apabila menempatkan Magelang dalam konteks sejarah ruang kekuasaan dan kewilayahan, dapatlah ditarik dari rentang panjang masa kekuasaan wangsa Sanjaya di Jawa Tengah. Fakta ini tersekam dalam Prasasti Canggal yang dijumpai di kompleks Candi Canggal, di atas gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang.

Jejak sezaman itu menyurat candrasengkala yang berbunyi: *Srutiindriyarasa*, atau angka tahun 654 Saka (732 Masehi). Prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Sansekerta ini memuat segenggam informasi penting. Dalam bait pertama dijelaskan bahwa raja Sanjaya berhasil membangun lingga di atas bukit Sthiranggadesa sebagai lokasi pemujaan pada 6 Oktober 732 M. Lima bait memuat pujian terhadap Siwa, Brahma, dan Wisnu. Dewa yang disebut pertama itu memperoleh tempat istimewa. Sedangkan bait ke-7 melukiskan kesuburan tanah pulau Jawa yang menghasilkan gandum (atau padi) melimpah serta tambang emas. Kenyataan ini menuduhkan tanah Magelang yang sedari dulu cukup makmur. Kondisi alam yang *ijo royo-royo loh jinawi* ini tidak mengherankan menghasilkan budaya vegetasi berikut toponim kampung bercorak flora.

Prasasti tersebut mengabarkan pula secara ringkas Sanna sebagai cikal-bakal penguasa kerajaan yang dikenal adil. Tak berselang lama, istana rusak. Sri Sanjaya adalah keponakan Sanna yang lahir dari rahim adiknya, Sannaha, menggantikan posisinya. Ia menahkodai kerajaan dengan segala kemasyhurannya. Dalam ukuran waktu, Sanjaya memerintah sampai permulaan abad X (Sutrisno Kustoyo, 1985). Dari prasasti itu, terpapar keterangan bangunan suci di gunung Wukir, yang hingga kini masih ada sisasisanya di atas gunung tersebut. Yang dimaksud tentu bukan Candi Prambanan, karena kita tahu bahwa Candi Prambanan itu baru diresmikan tahun 856 M. Beberapa arkeolog menengarai letak candi tersebut berada di suatu kawasan yang dijepit Sungai Progo dan Sungai Elo, sebagai sungai terbesar di Magelang.

Selain faktor gunung vulkanik yang mengitari kawasan Magelang, kesuburan tanah pertanian di Magelang dipengaruhi oleh Sungai Progo dan Sungai Elo berikut anak sungainya. Kahanan ini tentu mendukung sistem pengairan dalam perkebunan dan pertanian di Magelang. Hasil budidaya para petani Magelang di masa lalu antara lain padi, jagung, kacang, tembakau, sayuran, dan

sebagainya. Berarti, masyarakat Magelang sedari zaman Mataram Kuno berhutang budi dengan kedua sungai yang mengalirkan air jernih itu. Menarik bahwa guna menjaga kualitas dan debit air, pemerintah periode kolonial melaksanakan penghijauan di area non-lahan pertanian. Tujuan dari kegiatan ini ialah mencegah bencana banjir dan tanah longsor. Wonosobo dan pegunungan Menoreh merupakan sedikit dari wilayah yang menuai hasil dari program penghijauan. Sementara Kedu dan Magelang menikmati atas pengontrolan debit air untuk pembangkit listrik tenaga air.

Sebelum Prasasti Mantyasih dan Prasasti Canggal mengemuka, sebetulnya ditemukan suatu prasasti di desa Lebak, Kecamatan Grabag (Magelang) di lereng gunung Merbabu, yakni prasasti Tuk Mas. Sumber sejarah ini dipahatkan pada sebuah batu alam yang besar yang terdiri di dekat suatu mata air. Hurufnya Pallawa yang tergolong muda, dan bahasanya Sansekerta. Merujuk interpretasi palaeografis dari arkeolog Krom, sumber ini lahir pada pertengahan abad VII M. Isinya pujian kepada suatu mata air yang keluar dari gunung, menjadi sebuah sungai yang dingin dan bersih melalui paasari dan batu-batu, bagaikan sungai Gangga.

Dalam prasasti tersebut tersurat aneka macam laksana dan peralatan upacara antara lain cakra, sankha, trisula, kundi, kapak, gunting, kudi, dolkmes, staf dan empat bunga padma. Laksana-laksana itu jelas menunjuk kepada agama Siwa. Bisa dibayangkan bahwa mata air itu dianggap sebagai sumber air yang suci. Di dekatnya terdapat asrama para pendeta yang mengelola sumber air tersebut (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1985: 98).

Di Kedu, terdapat Prasasti Raja Balitung bertarikh 829 Saka atawa 907 Masehi merekam sederet nama raja pengganti Sanjaya: Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya (732-780), Rakai Panangkaran (778-780), Rakai Panunggalan (780-800), Rakai Warak (800-819), Rakai Garung (819-838), Rakai Pikatan (838-851), Rakai Kayuwangi (851-882), dan Rakai Watuhmalang (886-900) (Sutjipto Wirjosuparto, 1957: 10).

Nama yang terakhir itu mengganti raja Balitung, dan tersurat pada piagam Kedu tahun 907 M. Kemudian, nama raja pengganti Raja Balitung, yaitu Raja Daksa (910-919), Raja Tulodong (919-921 M), dan Raja Wawa (921-929 M). Terputus informasi perihal kekuasaan Sanjayawangsa di Jawa Tengah usai lengsernya Raja Wawa. Pasalnya, Empu Sindok dari keluarga Raja Wawa menggeser kerajaan ke Jawa Timur tahun 929 M. Maka,

warta kahanan area Magelang masa Hindu-Buddha cukup sampai pemerintahan Raja Wawa. Petinggi kerajaan di Jawa Tengah abad VIII-IX adalah keluarga Sanjaya dan Sailendra. Arkeolog J.G. de Casparis membeberkan barisan nama raja keluarga Sailendra: Bhani (752 M); Wisnu (Dharmatunggal) (775-782 M); Indra (Sanggramadhananjaya) (782-824 M); Samaratungga (824-832 M); Pramodawardhani (\pm 842 M); dan Balaputradewa (856 M) (Sutjipto Wirjosuparto, 1957: 11).

Bila prasasti Canggal merekam Raja Sanjaya, maka Prasasti Kalasan bertarikh 700 Saka (778 M) mengabarkan Raja Sailendra. Prasasti berhuruf Pranagari itu memotret agama Buddha Mahayana yang dipeluk keluarga Sailendra. Dalam sumber berbahasa Sansekerta ini tidak disebutkan raja keluarga Sailendra, tetapi nama raja keluarga Sanjaya ialah raja Panangkaran. Maklum bila orang menduga Raja Panangkaran ialah Wisnu atau Dharmatungga. Jika hipotesis benar adanya, maka raja-raja itu berkolaborasi, mendirikan bangunan suci, serta menjalankan pekerjaan yang bertemali dengan religi (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1985: 98).

Menyoal unsur religi setempat, periode Sailendrawangsa di Jawa Tengah merebak agama Buddha dengan aliran Mahayana. Di Jawa Tengah abad VI pernah berkembang Buddha Hinayana yang disebarkan pendeta Jnanabhadra. Kala itu, populer pula cerita Sang Buddha Gautama di kawasan ini. Selanjutnya, merangsek pengaruh agama Buddha Mahayana bermuasal dari India utara. Menjamurnya Buddha Mahayana terbukti dengan corak, bentuk, relief, dan arca dari warisan bangunan. Misalnya, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Sari, Candi Plaosan, Candi Sewu, Candi Banyuniba, dan sebagainya. Lantas, kitab sucinya baru dijumpai era Raja Sindok, yang digarap Sri Sambharasuryatrayana. Buku ini membabar aspek mandala, samadhi, latihan, pernafasan, komparasi Buddha dan Dwinya, nama ajaran, aliran, dan perwatakan, tempat, warna, dan sikap tangan dewa agama Buddha (Kats. J, 1910).

Pustaka ini memuat pula Lima Pokok Landasan Agama Buddha, yakni Mengakui Sang Tri Ratna (Buddha, Dharma, Sanggha); Empat Kasunyataan Mulia (Aryasatyani) dan Arya Beruas Delapan (Astanyhikamarga); Tiga corak universal; Prasetya Samutpada (hukum kejadian yang saling bergantung); Karma (Parwakarma dan Karmapala) dan Tumimbalaksi (Jasmin S. Saduran, 1971: 2).

Dalam kitab Sang Hyang Kamahayanikan, lima landasan itu dipaparkan dengan gamblang cara pengamalannya, dan sesuai relief di Candi Borobudur di Magelang. Merekahnya agama Buddha detik itu dipengaruhi aliran Sahtisme, buah perkawinan Pramodawardhani (keluarga Sailendra) dengan Sang Ratu Pikatan (keluarga Sanjaya). Saling tarik-menarik pula antara agama Buddha Mahayana dengan agama Siwa. Sisa-sisa dari warisan religi ini masih tampak dalam perilaku spiritual masyarakat Magelang. Semisal, aktivitas bertapa yang kemudian hari menghasilkan toponim Kampung Sido Tapa.

Magelang dan wilayah sekitarnya mulai ditinggalkan saat Raja Sindok menggantikan Raja Wawa tahun 929. Alasan ibukota keraton dari Jawa Tengah dibedol ke Jawa Timur menimbulkan banyak penafsiran. Menyeruak beberapa pendapat. Pertama, perpindahan ini gara-gara bencana alam. Kedua, keturunan Balaputradewa yang menetap di Suwarnabhumi hendak ke Jawa Tengah yang subur. Demi keamanan politik, Raja Sindok memboyong kerajaannya ke Jawa Timur. Ketiga, perpindahan ini lumrah dikerjakan sebab Jawa Tengah sudah kehilangan pamor sedari era Raja Wawa. Semenjak dipindah ke Jawa Timur oleh Ratu Sindok, pengaruhnya makin kuat. Kekuasaan kerajaan melebarkan sayap hingga seluruh Nusantara. Begitu pula bidang kesusastraan, arsitektur, pelayaran, pemerintahan, perdagangan, dan sebagainya. Perpindahan itu adalah langkah tepat dan membuahkan pengaruh luas.

Kendati ibukota dibedol ke Jawa Timur, Mataram Kuno telah meninggalkan jejak desa perdikan di kawasan lama. Secara konseptual, desa perdikan ialah suatu desa yang dibebaskan dari kewajiban pajak kerajaan. Juga tidak perlu melakoni kerja paksa membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan sebagainya. Berhak pula melestarikan hukum adat. Penduduk berdiam di desa perdikan memanggul tugas merawat bangunan religi dan bertemali dengan pusat kekuasaan (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1985).

Dalam prasasti sezaman, tersebutkan masyarakat desa dinahkodai rama desa yang terdiri dari beberapa orang dengan jabatan dan tugas berbeda-beda. Pengangkatan rama desa lewat pilihan anggota desa dengan mengingat unsur usia, pengalaman, tanggungjawab, dan kebijaksanaan terhadap desanya. Selepas dilantik, ia menjalankan roda pemerintahan dibantu 5 pamong desa (*halima marwwud*). Tugasnya diperingan oleh *mapadahi* saat kegiatan gotong royong dan

keramaian desa. Contohnya, acara kesenian. Rama desa dibantu pemimpin gamelan mementaskan kesenian di desa atau empat lain. Pembantu lainnya disebut *wineka*, yakni pesuruh desa yang bertanggungjawab atas relasi antardesa demi kepentingan kolektif. Segala sesuatu bertemali dengan kondisi desa acap didiskusikan bareng rama desa beserta pembantunya. Semuanya dikerjakan gotong royong. Cara ini ternyata sudah mengada sebelum hadirnya kebudayaan India. Aktivitas sosial melibatkan masyarakat banyak ini dapat dipergoki di pedesaan Magelang hingga kini.

Periode Mataram Kuno tamat digantikan Mataram Islam. Wilayah Kedu masuk dalam area kekuasaan Panembahan Senopati sebelum digantikan Sultan Agung (1613-1645). Tahun 1646 tongkat kekuasaan dilanjutkan puteranya, Sultan Amangkurat I. Raja ini menggelar perjanjian dengan Belanda demi menjinakkan *ontran-ontran*. Perjanjian itu menjadi jalan masuk Belanda mengintervensi kepentingan kerajaan, sekaligus mengontrol wilayah jajahan. Kala itu, pecah pemberontakan Trunojoyo. Amangkurat I tutup usia tatkala memadamkan peperangan itu. Naiklah Pangeran Adipati Anom berjejudul Amangkurat II sebagai gantinya. Belanda membantu menumpas pemberontak. Belanda meminta imbalan kepada raja untuk merelakan wilayah kekuasaannya termasuk daerah Kedu (de Graaf: 1987).

Seabad kemudian, kembali timbul peperangan sengit antara Paku Buwana III dengan Pangeran Mangkubumi. Guna menghentikan perang yang dikobarkan Pangeran Mangkubumi, digelar perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian itu dilakukan antara Belanda, Pangeran Mangkubumi, dan Paku Buwono III. Traktat ini memuat keputusan area kekuasaan Mataram dipecah dua, yakni Yogyakarta untuk Pangeran Mangkubumi (Hamengku Buwana I) dan Surakarta dikuasai Paku Buwono III. Melongok kesepakatan politik itu, Kedu masuk wilayah *negaragung* Yogyakarta. Daerah lain masuk wilayah itu antara lain, Pajang, Banyuwetan/ Sukawati, Dagelan, Bumi Gede, serta barat daya Semarang dari Ungaran hingga Kedungjati (Merle Ricklef, 2002).

Januari 1807, posisi gubernur jenderal diisi Herman Willem Daendels. Lelaki ini kondang galak, keras, bertangan besi, dan seluruh perintahnya kudu ditaati. Karakter Daendels memercikkan konflik dengan Hamengku Buwono II. Keributan ini menyebabkan kahanan Keraton Yogyakarta tidak kondusif. Bahkan, area kekuasaan Keraton Yogyakarta menyempit karena direngkuh Belanda. Antara

lain, Kedu, Jipang (Bojonegoro), dan Japan (Majakerta).

Kala Daendels duduk di kursi kekuasaan, Kedu menjadi wilayah kekuasaan Belanda. Daendels menyanggah jabatan lengkap *Gouverneur Generaal der Aziatische Kolonien en Bezittingen*. Ia membagi wilayah kekuasaannya dalam *Perfectuur (gewest)*, dan dikepalai seorang berpangkat *Perfect* (gubernur/ residen). Sebuah *perfectuur* terdiri dari beberapa kabupaten, yakni pembagian wilayah asli Jawa yang dikepalai bupati. Bupati dikasih tugas mengurus perkara orang pribumi, sementara *perfect* menangani persoalan orang Eropa. Bupati diangkat sebagai pegawai kerajaan dan diberi tanda jasa. Hal itu bagian dari pengontrolan Daendels (Sumartono, 1988).

Manakala Inggris berkuasa, peran bupati dipapras. Selepas Belanda kembali merebut

Hindia Belanda, bupati di Jawa tinggal sedikit. Gubernur Jenderal Van der Capellan (1819-1826) emoh menyetujui usulan Raffles mengembalikan kekuasaan bupati sebelumnya. Dari Van der Capellan duduk di kursi kekuasaan hingga lahirnya Undang-undang Desentralisasi 1903, Kedu merupakan daerah *Gewest* yang diperintah residen, dan punya daerah bawahan berupa kabupaten dikepalai bupati. Regulasi itu membagi wilayah menjadi daerah *gewest*. Wilayah Kedu meliputi *regentschap* (kabupaten) Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, serta Karanganyar. Terdapat data kolonial untuk mengetahui aspek luas kewilayahan di Karesidenan Kedu sebagai berikut:

Tabel 1 Luas Lahan di Wilayah Karesidenan Kedu

Wilayah	Luas Area (km ²)		Luas Sawah (km ²)		Luas pemukiman (km ²)	
	1920	1930	1920	1930	1920	1930
Kab. Wonosobo	0	1009,77	0	228,41	0	770,15
Kab. Keboemen	0	553,64	0	220,24	0	465,76
Kab. Koetoardjo	0	566,57	0	201,98	0	461,53
Kab. Poerworedjo	0	513,13	0	118,48	0	470,01
Kab. Magelang	0	1154,81	0	425,66	0	972,03
Kab. Temanggung	0	862,29	0	220,38	0	697,37
Total	0	4660,21	0	1415,15	0	3836,85

Sumber: NN, *Volkstelling* 1930. (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934). Hlm.166-170.

Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817 menetapkan Kedu menjadi karesidenan tersendiri. Setahun kemudian, Magelang dijadikan sebagai ibukota Karesidenan Kedu. Area Karesidenan Kedu dibagi menjadi *Afdeeling* Magelang dan *Afdeeling* Temanggung. Mulai 1 Agustus 1901 Karesidenan Kedu adalah penggabungan dari beberapa daerah yang semula masuk wilayah Kedu dan Bagelen. Sedari 1903 area karesidenan atau *gewest* diberikan hak otonom dan kuasa membentuk dewan daerah sendiri. Di Hindia Belanda, implementasi regulasi itu tahun 1905 dengan terbitnya *Decentralisatie Besluit Staatsblad* 1905 No.137. Pembentukan daerah otonom Karesidenan Kedu dimulai tahun 1907 yang termuat dalam *Staadblad* 1908 No.177.

Pemerintah kolonial rupanya juga mengatur perbatasan Kota Magelang. Dalam konteks perbatasan kota, batas utara Magelang ialah Karesidenan Semarang. Sisi selatan bertemu Yogyakarta. Bagian timur terdapat Karesidenan Surakarta, serta sebelah barat ada Karesidenan Banyumas. Sementara batas Kota Magelang dapat ditinjau dari *besluit* 20 Januari 1905 No. 22 (*Staatsblad*

No. 70). Disebutkan batas sisi utara, yakni desa Kramat, Sambungredjo. Sepanjang desa ini, terdapat Sungai Progo dan lapangan, serta Rumah Sakit Jiwa membentang ke utara dan timur menuju jalan besar dari Secang ke Magelang. Penggal jalan itu membentang ke selatan hingga batas kecamatan Magelang dan Secang mengikuti batas kecamatan tersebut menuju Sungai Elo. Kemudian batas sebelah timur, yaitu dari titik potong utara Sungai Elo mengikuti tepi kanan sampai titik potong jalan desa melewati dukuh Salakan dan dukuh Soka.

Sementara batas sisi selatan, yakni jalanan desa dari Sungai Elo hingga titik simpang jalan dengan jalan ke Yogyakarta terus ke tepi barat. Dari jalan itu, menuju selatan sampai Sungai Soka mengikuti hulu dan Sungai Tangsi. Berikutnya, tepi kanan tangsi dan selokan kecil mengalir menuju batas utara dari dukuh Seneng menuju Sungai Bening. Lalu, tepi kiri Sungai Bening sampai titik potong batas antara desa Bulurejo dan Jurangombo mengikuti perbatasan desa itu menuju Sungai Progo. Perbatasan bagian barat ialah tepi kiri Sungai Progo dengan batas selatan sampai batas

utara, dimana Magelang mulai 1 April 1906 ditetapkan sebagai *gemeente*. Bersama Semarang, Tegal, dan Pekalongan, Magelang merupakan wilayah di Jawa Tengah yang ditetapkan sebagai *gemeente* (kota besar) (Kusumahendra Dwi Saputro, 2016: 26).

Kala itu, penunjukan suatu daerah sebagai kota besar kudu punya jumlah warga kaum Eropa yang relatif banyak, dan dijumpai perkebunan gula, kopi, tembakau atau jaringan perdagangan yang luas di sekitar kota itu. Faktanya memang demikian. Kawasan Magelang sohor sebagai pemasok tembakau berkualitas. Dukungan faktor tanah subur dan aksesibilitas yang bagus kian menyebabkan hasil perkebunan tembakau naik daun dan mampu menembus pasar Eropa. Adapun produk yang dihasilkan dari perusahaan pengolahan tembakau di Magelang, yaitu cerutu, rokok, dan kretek.

Sederet perusahaan tembakau di Magelang digarap bangsa Belanda dan Tionghoa, yakni pabrik milik D.J. H. Reyneke, pabrik milik J.M.J. van Eijck, pabrik kepunyaan Lie Kok Liang, pabrik milik J.H. Thomson, pabriknya Liem Kian Bik, pabrik *Soembing* digarap C.A.A. Th. Gatzen. V.J. Chevalier, pabrik kepunyaan Ko Djing Han, pabrik milik Lie Kok Lian, pabrik dinahkodai Liem Tjay An, pabrik dipimpin The Kiem Toen, pabrik *Aroem Sarie* milik Ko Tjaj Beek, dan perusahaan *Tidar* dikepalai Mac Gillavry (Dimas Adhi Ratmoko. 2016).

Sebetulnya, cuma golongan masyarakat Eropa saja yang mereguk manfaat perkebunan dan hak otonomi ini. Buktinya, jumlah populasi kalangan Eropa di Magelang melonjak serta permintaan pembangunan sarana penunjang kebutuhan komunitas Eropa meningkat. Di samping menetapkan daerah karesidenan otonom, aturan ini mengukuhkan kota di dalam karesidenan sebagai kota otonom. Juga menghidupkan kota tertentu di karesidenan sebagai *gemeente*.

Gementee dalam perkembangannya memamerkan kehidupan yang lebih bagus ketimbang daerah otonom karesidenan. Status

staasgemeente dan berhak mengatur rumah tangga sendiri baru diperoleh Magelang tahun 1926. Status ini menegaskan suatu pemerintahan mengacu hukum Barat dalam implementasinya di tengah hukum adat. Buahinya, kaum Eropa memiliki hak istimewa di atas pemerintahan pribumi. Kenyataan ini menggiring pada sistem dualistik, yakni satu pemerintahan modern, tertib, dan teratur namun hanya dikuasai komunitas Eropa, sedangkan satunya model pemerintahan tradisional dipegang birokrat pribumi. Merujuk struktur sosial kala itu, pegawai Eropa-lah yang memerintah dan menguasai pemerintahan pribumi (Kusumahendra Dwi Saputro, 2016: 28-29).

Terbit aturan membentuk Jawa Tengah menjadi propinsi lewat *Provincieordonnantie* 1924, yakni *Ordonnantie* 1929 *Staadblad* 1929 No.227 (*Instellings ordonnantie van de Provincie Midden Java*). Regulasi ini berlaku mulai 1 Januari 1930. Kala itu, batas wilayah Jawa Tengah tersurat pada *Staadblad* 1933 No.251 dan No.335 yang diperbaharui dengan *Staadblad* 1934 No.682. Propinsi Jawa Tengah dipilah menjadi wilayah karesidenan, dan saban karesidenan terdiri dari kabupaten-kabupaten. Yang masuk Karesidenan Kedu tahun 1934, yaitu Magelang, Wonosobo, Temanggung, Purworejo, Kebumen, dan Kota Magelang. Pada 1934 terjadi penggabungan wilayah, yakni Kutoarjo digabung Purworejo, dan Karanganyar (Karesidenan Banyumas) digabung Kebumen (Sumartono. 1988; Wahyu Setyaningsih. 2014).

Aturan itu menetapkan kota dalam *gewest* sebagai kota otonom pula. Kota di *Gewest* Kedu dijadikan kota otonom, yakni Magelang dengan nama *Gemmete Magelang* tersurat dalam *Staadblad* 1906 No.125. Tahun 1929 terbit *Staadblad van Nederlandsch Indie* 1929 No.394 memutuskan *Staatsgemmente Magelang* berhak mengatur pemerintahannya sendiri. Sebelum UU Desentralisasi 1903 ditelurkan, Kota Magelang merupakan ibukota karesidenan Kedu sekaligus ibukota kabupaten Magelang.

Tabel 2. Luas Wilayah di Kabupaten Magelang

District	Luas Area (km ²)		Luas Sawah (km ²)		Luas Pemukiman (km ²)	
	1920	1930	1920	1930	1920	1930
Salaman	0	262,38	0	80,55	0	229,74
Salam	0	119,61	0	64,03	0	100,36
Moentilan	0	201,42	0	85,79	0	161,49
Tegalredjo	0	155,92	0	36,75	0	132,5
Grabak	0	155,74	0	45,52	0	127,83
Magelang	0	91,29	0	48,88	0	78,41
Bandongan	0	168,45	0	64,14	0	141,7

Total	0	1154,81	0	425,66	0	972,03
--------------	---	---------	---	--------	---	--------

Sumber: NN, *Volkstelling* 1930. (Batavia: Departement van Economische Zaken, 1934) hlm.166-170.

Bila dicermati dari keseluruhan luas daerah di Kabupaten Magelang, yang menduduki paling luas wilayah untuk lahan sawah ialah Salaman, dan yang paling sempit adalah Tegalredjo. Kemudian, luas sawah di Distrik Magelang berada di urutan tengah dikomparasi distrik lainnya. Kabupaten Magelang justru punya wilayah terkecil sebagai daerah pemukiman dibandingkan wilayah lain. Sedangkan area persawahan Tegalrejo menempati urutan terkecil jika dikomparasikan dengan wilayah lainnya. Ditinjau dari segi luas daerah pemukiman, Salaman memiliki tingkat luas pemukiman cukup tinggi. Bila ditengok dari luas daerah persawahan, Muntilan memiliki tingkat luas wilayah sawah yang lebih luas ketimbang distrik lainnya. Fakta yang tersaji periode kolonial tersebut masih menunjukkan bahwa Magelang menjadi tempat favorit untuk pemukiman, termasuk orang-orang Eropa.

4. Kesimpulan

Magelang dulunya merupakan bagian dari kawasan Kedu. Karena itu, dua nama ini tidak mungkin dipisahkan satu persatu lantaran punya pertalian sejarah. Sejarah mencatat, Magelang sedari era Mataram Kuno hingga kolonial adalah kawasan yang penting dalam bidang pemerintahan dan pertahanan. Kabupaten Magelang yang semula masuk Karesidenan Kedu, secara geografis terletak di tengah-tengah pulau Jawa dan merupakan satu-satunya karesidenan yang tidak memiliki perbatasan dengan laut. Posisinya yang strategis berada di persilangan Jawa Tengah menyebabkan Magelang dipahami sebagai daerah istimewa oleh pemerintah kolonial. Unsur aksesibilitas juga melatarbelakangi tuan kulit putih memilih kawasan ini untuk bermukim.

Sementara itu, letaknya yang berada di dataran tinggi dan dikepung banyak gunung berujung pada kesuburan tanah. Lantas kerajaan Mataram Kuno tanpa ragu memilih Magelang sebagai cakupan wilayah. Kentara sekali aspek persediaan atau keterjaminan pangan menjadi pertimbangan penguasa kerajaan Mataram Kuno sampai Mataram Islam. Faktor

tanah subur dan vegetasi yang baik dinilai sebagai peluang penopang utama roda kerajaan, meski sektor ekonomi pasar kurang menonjol di wilayah Magelang. Lahan pertanian-perkebunan serta kondisi alam yang membuahakan kesejukan membuat Magelang menjadi incaran bagi penguasa untuk terus memikirkan (mengistimewakan) kawasan ini. Bahkan, Magelang periode kolonial (sampai periode kemerdekaan Indonesia) dijadikan pusat militer di Jawa Tengah.

Orang-orang Eropa banyak yang mengadu nasib di bidang perkebunan, sampai akhirnya memilih tinggal di Magelang lantaran menjanjikan kehidupan nyaman dan tenang dengan alam yang sejuk. Dengan pertimbangan kesuburan tanah dan posisi yang strategis, Magelang secara kewilayahan berubah, terus menyesuaikan kepentingan pemegang tampuk kekuasaan. Dari studi sejarah dengan perspektif kekuasaan, sebenarnya dapat dilacak perkembangan administrasi kewilayahan suatu daerah secara detail dan kronologis, seperti Magelang yang merentang dalam ruang dan waktu. Untuk mengamankan sebuah kekuasaan dari ancaman tangan musuh dan bencana alam kelaparan, penguasa sebagai penentu kebijakan sebuah daerah ternyata tidak bisa melepaskan aspek geografi dan kondisi tanah..

Daftar Pustaka

- Arsip *Ordonnantie* 1929 *Staadblad* 1929 No.227 ANRI
- De Graaf, H.J. 1987. *Disintegrasi Mataram di Bawah Mangkurat I*. Jakarta: Grafiti Pres.
- Dimas Adhi Ratmoko. 2016. "Perkembangan Industri dan Perdagangan di Magelang (1908-1942)". *Skripsi*. Departemen Sejarah, FIB: UGM.
- Jasmin S. 1971. *Saduran Kitab Suci Sang Hyang Kamahayanikan*. Jawa Tengah: UPD Perbuddhi.
- Kusumahendra Dwi Saputro. 2016. "Trem dalam Kota: Pendayagunaan Tram Trayek Yogyakarta-Willem I di Kota

- Magelang 1898-1930-an.” *Tesis*. Jurusan Pascasarjana Sejarah, FIB: UGM Yogyakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1985. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purnawan Basudono. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ricklef, Merle. 2002. *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi, 1749-1792: Sejarah Pembagian Jawa*. Yogyakarta: Matabangsa.
- Suhartono, dkk. 1993. *Kondisi dan Potensi Lingkungan Sosial Budaya Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: Penelitian Fakultas Sastra UGM.
- Sumartono. 1988. *Sekilas Menelusuri Sejarah Magelang*. Magelang: Departemen P dan K Kotamadya.
- Sutjipto Wirjosuparto. 1957. *Sejarah Bangunan Kuno Dieng*, Jakarta: Kalimosodo.
- Sutrisno Kustoyo. 1985. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tedy Harnawan. 2013. “Di Bawah Bayang-bayang Modernitas: Orang-orang Indo di Kota Magelang 1906-1943”. *Skripsi*. Jurusan Sejarah, FIB: UGM Yogyakarta.
- Volkstelling 1930*. 1934. Batavia: Departement van Economische Zeken.
- Wahyu Setyaningsih. 2014. *Perkembangan Infrastruktur Kota Magelang (1900-1942)*. Tesis. S2 Sejarah, FIB: UGM Yogyakarta.
- Wahyu Utami dan Widianingsih, Vini. 1935. *Hal-hal yang Menarik dari Magelang*. Terjemahan dari H.J. Sjouke, *Watenswaardigheden van Magelang*.